

## Tokoh Pesantren Muhammadiyah K.H. Yunus Muhammadi Raih Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam 2015

Senin, 14-12-2015



**Jakarta - Fastabiqu.com** | Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam kembali memberikan penghargaan

tertinggi kepada para pionir, teladan, dan tokoh-tokoh yang peduli dan berdedikasi dalam pengembangan pendidikan

Islam di Indonesia. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

dalam ajang

Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015 di Jakarta, Jumat (11/12) malam.

“Apresiasi ini diberikan kepada putra putri bangsa dalam berbagai kategori, yang menunjukkan bahwa madrasah,

sekolah, perguruan tinggi dan pesantren kita berhasil mengembangkan kognisi, afeksi dan psikomotoriknya serta karakter

secara optimal,” kata Menag Lukman.

KH. Yunus Muhammadi, Ketua Ittihad Al Ma’ahid Al Muhammadiyah (ITMAM), Persatuan Pondok Pesantren Muhammadiyah

se-Indonesia adalah salah satu penerima penghargaan API 2015 tersebut. Selain Kyai Yunus, dua nama lain yang

mendapatkan penghargaan untuk katagori perorangan atau tokoh masyarakat yang memajukan pondok pesantren adalah

Ustadz Yusuf Mansur, pengasuh Pesantren Daarul Qur'an dan KH. Bai Ma'mun bin Abidin dari Menes, Pandeglang, Banten.

Selain menjabat sebagai Ketua ITMAM, Kyai Yunus juga pernah menjadi Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam

Syuhodo Sukoharjo, Jawa Tengah. Kyai Yunus turut mendirikan dan mengembangkan pesantren di seluruh Indonesia

melalui ITMAM. Sebelum ada ITMAM, Pesantren Muhammadiyah secara nasional hanya 67, namun berkat jasa Kyai Yunus,

jumlahnya sekarang mencapai 150 lebih.

“Selamat kepada Pak Yunus Muhammadi atas penghargaan sebagai Tokoh Nasional yang berperan aktif dalam memajukan

Pondok Pesantren yang diberikan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015. Semoga makin memacu kemajuan Ponpes

Muhammadiyah yang berdayasaing tinggi dan berkeunggulan,” ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. H. Haedar

Nashir, M.Si saat memberikan ucapan selamat kepada Kyai Yunus.

Seleksi penerima API 2015 dilakukan lewat tahap penilaian portofolio kebijakan, survei opini pemangku kepentingan

kebijakan pendidikan Islam, dan penilaian oleh Dewan Juri yang beranggotakan akademisi, praktisi dan para pejabat

di bidang pendidikan Islam.

sumber: [fastabiqu.com](http://fastabiqu.com)